

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, masih banyak perusahaan dalam penyajian informasi laporan keuangan dimana dalam laporan tersebut ada yang baik dan ada juga yang buruk dalam penyajian laporan keuangan seperti tidak adanya integritas, dimana hal tersebut dapat menyajikan informasi yang disampaikan tidak benar dan adil bagi beberapa pengguna laporan keuangan. Seperti kasus Enron Corporation yang memanipulasi laporan keuangan, Enron adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di antaranya yaitu listrik, gas, alam, kertas, komunikasi, dan lain-lain. Runtuhnya Enron merupakan kasus kehancuran terbesar korporasi di AS. Keruntuhan ini bukan disebabkan oleh ekonomi dunia yang sedang melemah melainkan kesalahan fatal dalam sistem akuntansi mereka. Dalam proses tujuh tahun terakhir, Enron lebih-lebihkan laba bersih dan menutupi utang mereka. Dalam proses penyusutan, sebab kebangkrutan itu Enron dicurigai telah melakukan *window dressing*. Manajemen Enron telah menggelembungkan pendapatannya (*mark up*) sebesar US \$600juta, dan menyembunyikan utangnya sebesar US \$1,2 milyar (Badewin,2019).

Di Indonesia, salah satu perusahaan yang melakukan manipulasi akuntansi adalah PT. Waskita Karya terkait dengan kelebihan pencatatan laba

bersih sebesar 500 milyar. Direksi PT. Waskita Karya merekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multi tahun depan sebagai pendapatan tahun tertentu (liputan6.com: mobile,2009; Astinia, 2009; Akram dkk, 2017). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan (corporate governance) sehingga tidak mampu mencegah penyajian laporan keuangan dengan integritas yang rendah (Fajaryani,2015; Akram dkk, 2017).

Pada dasarnya, setiap perusahaan memiliki ikatan yang erat dengan laporan keuangan karena informasi yang digunakan oleh investor dan kreditor dalam berinvestasi sehingga perusahaan dapat beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Fenomena yang terjadi membuktikan bahwa kurangnya integritas laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. Penyajian laporan tidak melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Badewin, 2019).

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dalam posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan berbagai sumber daya yang telah dipercayakan pengelolaannya kepada mereka (SAK, 2007 ; Fajaryani, 2015; Akram dkk,2017).

Laporan keuangan yang berintegritas memenuhi kualitas *reliability* yang terdiri atas 3 komponen, yaitu *verifiability*, *representational faithfulness*, dan *neutrality*. Integritas informasi laporan keuangan dapat diproksi dengan konservatisme. Dimana konservatisme merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam mengakui aktiva dan laba karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi dengan ketidakpastian (Wibowo, 2002; Gayatri dan Saputra, 2013; Akram dkk, 2017). Konsep konservatisme dalam penggunaannya adalah untuk mengakui, mengukur dan melaporkan nilai aktiva dan pendapatan lebih rendah, dan nilai kewajiban dan beban lebih tinggi (Jama'an, 2008; Gayatri dan Saputra, 2013; Akram dkk, 2017).

Integritas menurut mulyadi (2011) dan Badewin (2019) adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, dimana seorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan merupakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan secara wajar, tidak bias, dan secara jujur dalam menyajikan informasi. Apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas, maka peluang seorang auditor dituntut akan semakin besar, karena laporan keuangan yang tidak berintegritas akan merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut (Badewin, 2019).

Banyak perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya integritas, dimana dalam informasi yang disampaikan

tidak benar dan tidak adil bagi pihak pengguna laporan keuangan. Jatuhnya perusahaan besar didunia pada awal dekade tahun 2000an akibat dari kasus-kasus hukum manipulasi akuntansi yang melibatkan perusahaan besar karena melakukan tindakan *earning management* telah memunculkan beberapa kasus pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui (Jamaan, 2008; Astinia, 2013; Akram dkk, 2017). Laporan keuangan yang berintegritas dapat menghasilkan jika terdapat standar akuntansi, auditor yang berkualitas, serta tata kelola yang baik serta diterapkan dalam entitas perusahaan tersebut. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat menunjukkan pengaruh keberadaan pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen, serta terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010 ; Badewin, 2019). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusutan laporan keuangan yang merupakan salah satu alat ukur kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang insentif. Sehingga kepemilikan institusional diharapkan dapat menekan

kecenderungan pihak manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi munculah peran komite audit, komite audit ini juga berperan dalam mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan (Badewin, 2019).

Menurut Tandiontong (2016) komite audit merupakan anggota terpilih dari dewan direksi atau komisaris klien dan professional, yang bertanggungjawab antara lain membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen. Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, dalam pelaporan keuangan komite audit bertugas untuk mengawasi audit laporan keuangan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Audit yang dilakukan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran sebuah laporan keuangan. Arens dkk (2008), Citra (2013) dalam Akram dkk (2017) menyatakan *Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Dimana standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit (Badewin. 2019).

Menurut Mulyadi (2011) dalam Febriana dan Rabaina (2019), kualitas audit yaitu suatu proses sistematis dimana untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan atau kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada yang berkepentingan. Apabila kualitas audit dapat memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan maka suatu integritas laporan keuangan dapat dicapai. Kualitas audit dapat terwujud apabila dapat memenuhi standar audit yang berlaku umum. Dimana standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor bertanggungjawab atas profesional yang dimiliki mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, dengan syarat pelaporan, dan bukti (Randal J dkk, 2011;

Citra, 2013 ; Akram dkk, 2017). Para pengguna laporan keuangan menyatakan bahwa kualitas audit akan terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada kesalahan atau kecurangn (fraud) dalam menyusun laporan keuangan (Akram dkk, 2017). Penelitian ini membuktikan bahwa kesesuaian hipotesis reputasi yang beragumen bahwa KAP besar memiliki insentif untuk mengaudit lebih akurat karena memiliki lebih banyak hubungan yang spesifik dengan klien dan akan hilang jika klien tersebut memberikan laporan yang tidak akurat (Ayem dan Yuliana, 2019).

Pergantian auditor atau *auditor switching* juga penting bagi laporan keuangan. Menurut (Wijayanti dan Januarti, 2011, Pradani, 2017) *auditor switching* merupakan pergantian KAP atau auditor yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* yang bersifat wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* yang bersifat wajib didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tahun 2008 yang mewajibkan bahwa perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama enam tahun dan akuntan publik selama tiga tahun yang sekarang telah direvisi dengan peraturan Pemerintah tahun 2015 dimana kewajiban mengganti seorang akuntan publik setiap lima tahun dan tidak ada pembatasan lagi untuk KAP (Widiyanti dan Shanti, 2017; Fulbertus,2018). Sedangkan pergantian auditor yang bersifat sukarela biasanya dilakukan pada saat auditor sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan keinginan pihak manajemen, dan untuk mengurangi biaya.

Terkait dengan beberapa kasus yang terjadi dan banyak yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka penelitian ini mengacu

pada penelitian yang dilakukan oleh Bedewin (2019) yang berjudul *“pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan”*. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel pergantian auditor. Tahun penelitian yang sekarang adalah tahun 2016-2018, dan studi kasusnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alasan penambahan variabel pergantian auditor karena peneliti ingin mengetahui apakah semua perusahaan yang terdaftar di BEI termasuk perusahaan yang menggantikan auditornya setiap masa periode atau tidak menggantikan auditor pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DAN PERGANTIAN AUDITOR, TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap Integritas Laporan Keuangan?

3. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap Integritas Laporan Keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh pergantian auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
2. Untuk menguji apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
3. Untuk menguji apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
4. Untuk menguji apakah Pergantian Auditor berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai integritas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.
- b. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan saat akan melakukan investasi di perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini terdapat sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dibahas teori yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti teori keagenan, teori sinyal, teori *stewardship*, pengertian integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, dan pergantian auditor.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas variabel yang digunakan, populasi dan sampel, data dan sumber data penelitian, serta metode analisis.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi paparan data dan hasil penelitian, serta pembahasan atas hasil analisis.

Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan.